

# **KLIPING BERITA MEDIA MASSA**

**Jumat, 12 April 2019**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 11)	Jumat, 12 April 2019	Menimbang Kebijakan Agraria	Kritik terhadap kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS) belakangan ini terpusat pada dua masalah. Pertama redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) yang meleset dari target, seperti luas dan jumlah bidang tanah, lokasi obyek redistribusi, dan subyek penerima manfaat yang tidak sesuai. Kedua, sertifikasi tanah sebagai implemtasi sistem administrasi pertanahan dianggap mendukung agenda liberalisasi pertanahan Bank Dunia di dalam sistem pasar tanah.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 12 April 2019	Air Sungai Ciliwung Siap Dikonsumsi	Masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat akan mengkonsumsi air dari Sungai Ciliwung mulai bulan depan seiring dengan rampungnya sistem penyediaan air minum baru di Katulampa Kota Bogor.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 12 April 2019	LMAN Bayar Rp 218 Triliun	Sampai dengan minggu kedua April 2019, Lembaga Manajemen Aset Negara mengklaim telah membayar biaya pembebasan lahan proyek bendungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 senilai Rp 2,18 Triliun.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 12 April 2019	Berita Foto	Kendaraan bergantian melewati jembatan darurat Batang Kalu, di Jalur Padang – Bukittinggi, Kayutanam, Kab Padangpariaman, Sumatera Barat, Kamis (11/4).
5	Media Indonesia (Halaman, 16)	Jumat, 12 April 2019	Urban Farming Adaptasi Perubahan Iklim	Kegiatan pertanian kota atau urban farming bisa menjadi salah satu solusi adaptasi perubahan iklim di wilayah perkotaan. Selain berfungsi sebagai peredam memanasnya temperatur akibat perubahan iklim, pertanian kota juga bisa berkontribusi mengurangi emisi dari transportasi perdangan produk pertanian.
6	Media Indonesia (Halaman, 10)	Jumat, 12 April 2019	Normalisasi Sungai masih Terkendala Pembebasan Lahan	Upaya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung masih terkendala dengan belum diserahkanya lahan yang telah dibebaskan.
7	Kompas (Halaman, 20)	Jumat, 12 April 2019	BBWSCC Cek Lahan yang sudah bebas	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane segera memeriksa bidang lahan yang sudah dibebaskan untuk penataan kali. Ada 13 hektar lahan yang dilaporkan sudah dibebaskan di sepanjang Kali Ciliwung untuk keperluan penataan kali.
8	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Jumat, 12 April 2019	Berita Foto	Rusun Khusus Santri Ponpes Al Islam Babussalam, Kalibening, Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur.

Judul	<b>Menimbang Kebijakan Agraria</b>	Tanggal	Jumat, 12 April 2019
Media	Koran Tempo (Halaman, 11)		
Resume	Kritik terhadap kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS) belakangan ini terpusat pada dua masalah. Pertama redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) yang meleset dari target, seperti luas dan jumlah bidang tanah, lokasi obyek redistribusi, dan subyek penerima manfaat yang tidak sesuai. Kedua, sertifikasi tanah sebagai implemtasi sistem administrasi pertanahan dianggap mendukung agenda liberalisasi pertanahan Bank Dunia di dalam sistem pasar tanah.		

# Menimbang Kebijakan Agraria

**Gutomo Bayu Aji**  
Peneliti LIPI



Kritik terhadap kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS) belakangan ini terpusat pada dua masalah. *Pertama*, redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) yang meleset dari target, seperti luas dan jumlah bidang

tanah yang terakumulasi di lingkaran elite ekonomi-politik oligarki. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan itu bukan hanya prematur, tapi ada kemungkinan juga teledor. Implementasi kebijakan RAPS itu sekarang meleset dari target. Masalah struktur penguasaan tanah pun sebatas menjadi komoditas politik dalam debat calon presiden atau selama masa kampanye pemilihan presiden.

Maka, rasanya kurang relevan apabila beberapa kalangan meninjaunya dari segi dampak, sebagaimana cara pandang

bayi" itu. Pada saat perencanaan, kebijakan itu memang tampak lebih didorong oleh keberanian ketimbang kecermatan setelah dipetieskan dalam trauma masa lalu selama lebih dari setengah abad terakhir.

Tapi setidaknya kita bisa merawat keberanian itu ke dalam suatu refleksi tentang kebutuhan-kebutuhan—termasuk data, informasi, pendekatan, dan organisasi—yang bisa digunakan untuk menyusun strategi kebijakan reforma agraria yang kontekstual dengan zaman sekarang dan mempunyai daya rom-

tanah yang terakumulasi di lingkaran elite ekonomi-politik oligarki. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan itu bukan hanya prematur, tapi ada kemungkinan juga teledor. Implementasi kebijakan RAPS itu sekarang meleset dari target. Masalah struktur penguasaan tanah pun sebatas menjadi komoditas politik dalam debat calon presiden atau selama masa kampanye pemilihan presiden.

Maka, rasanya kurang relevan apabila beberapa kalangan meninjaunya dari segi dampak, sebagaimana cara pandang

bayi" itu. Pada saat perencanaan, kebijakan itu memang tampak lebih didorong oleh keberanian ketimbang kecermatan setelah dipetieskan dalam trauma masa lalu selama lebih dari setengah abad terakhir.

Tapi setidaknya kita bisa merawat keberanian itu ke dalam suatu refleksi tentang kebutuhan-kebutuhan—termasuk data, informasi, pendekatan, dan organisasi—yang bisa digunakan untuk menyusun strategi kebijakan reforma agraria yang kontekstual dengan zaman sekarang dan mempunyai daya rom-

tanah yang terakumulasi di lingkaran elite ekonomi-politik oligarki. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan itu bukan hanya prematur, tapi ada kemungkinan juga teledor. Implementasi kebijakan RAPS itu sekarang meleset dari target. Masalah struktur penguasaan tanah pun sebatas menjadi komoditas politik dalam debat calon presiden atau selama masa kampanye pemilihan presiden.

Maka, rasanya kurang relevan apabila beberapa kalangan meninjaunya dari segi dampak, sebagaimana cara pandang

bayi" itu. Pada saat perencanaan, kebijakan itu memang tampak lebih didorong oleh keberanian ketimbang kecermatan setelah dipetieskan dalam trauma masa lalu selama lebih dari setengah abad terakhir.

Tapi setidaknya kita bisa merawat keberanian itu ke dalam suatu refleksi tentang kebutuhan-kebutuhan—termasuk data, informasi, pendekatan, dan organisasi—yang bisa digunakan untuk menyusun strategi kebijakan reforma agraria yang kontekstual dengan zaman sekarang dan mempunyai daya rom-

tanah, lokasi obyek redistribusi, dan subyek penerima manfaat yang tidak sesuai. *Kedua*, sertifikasi tanah sebagai implementasi sistem administrasi pertanahan dianggap mendukung agenda liberalisasi pertanahan Bank Dunia di dalam sistem pasar tanah.

Kritik itu secara tidak langsung juga telah membongkar proses pembuatan kebijakan RAPS yang bisa dikatakan prematur. Sebagai contoh, penetapan target TORA sebesar 9 juta hektare dan perhutanan sosial 12,7 juta hektare tidak dibuat berdasarkan kon-

disi lapangan. Penentuan luas dan lokasi didasari peta indikatif dengan skala 1:250 ribu yang tidak bisa mengidentifikasi batas-batas penguasaan tanah secara aktual, tumpang-tindih penguasaan lahan, serta relevansi obyek RAPS dengan subyek penerima manfaat, antara lain dari jarak lokasi, kondisi tanah dan lingkungan, sistem pengairan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Contoh lain adalah tafsir atas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 mengenai hutan adat di dalam RAPS, yang menun-

gusaha hutan, hutan tanaman industri, dan hak guna usaha yang terdata secara resmi. Perbandingan ini belum menghitung bentuk-bentuk penguasaan tanah lain oleh negara dan swasta, seperti yang terakumulasi dalam bank tanah di kawasan-kawasan pangan, permukiman, industri, dan berikut. Dengan kata lain, total target itu masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan penguasaan tanah oleh negara dan swasta.

Masalah mendasar yang tidak disentuh sama sekali dalam kebijakan RAPS adalah struktur pengu-

evaluatif yang mengemuka belakangan ini. Alih-alih meninjau dampaknya, kebijakan RAPS itu juga belum menyentuh banyak hal yang berkaitan dengan pasca-redistribusi, seperti teknologi produksi dan sistem budi daya, teknologi pengolahan pascapanen, distribusi produk dan redistribusi manfaat, serta lembaga ekonomi dalam sistem pemasaran.

Saat ini, ketimbang meninjau dampak yang belum tentu menemukan relevansinya, lebih penting menarik pembelajaran dari "kebijakan yang masih

bak terhadap struktur penguasaan tanah itu.

Selain itu, sekarang tidak ada lagi kekuatan revolusi yang bisa menggerakkan agenda reforma agraria di dalam suatu "gebrakan cepat". Hampir semua partai politik tidak menunjukkan ketertarikan pada agenda ini. Sementara itu, kekuatan dari bawah, yang diimajinasikan sebagai *people power*, tidak pernah terbentuk hingga kini atau malah tersegmentasi ke dalam berbagai kepentingan yang berlainan arah.

TEMPO/AMAM YUNNI

Judul	Air Sungai Ciliwung Siap Dikonsumsi	Tanggal	Jumat, 12 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat akan mengkonsumsi air dari Sungai Ciliwung mulai bulan depan seiring dengan rampungnya sistem penyediaan air minum baru di Katulampa Kota Bogor.		

# Air Sungai Ciliwung Siap Dikonsumsi

Bisnis, BOGOR — Masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat akan mengonsumsi air dari Sungai Ciliwung mulai bulan depan seiring dengan rampungnya sistem penyediaan air minum baru di Katulampa Kota Bogor.

“Sampai sekarang pasokan air baku Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor hanya dari Sungai Cisadane. Nanti SPAM Katulampa ini secara perdana pasokan air bakunya berasal dari Sungai Ciliwung,” kata Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Deni Surya Sanjaya, Kamis (11/4).

Menurutnya, pihak pelaksana tinggal melakukan penyempurnaan pipa distribusi utama yang pemasangannya tersisa beberapa meter lagi, sedangkan instalasi pengolahan air (*water treatment plant/WTP*) dan *intake* sudah lebih dulu dirampungkan.

Deni memprediksi secara keseluruhan proyek itu selesai sebelum memasuki bulan puasa sehingga bisa menambah pasokan air baku PDAM Tirta Pakuan yang selama ini hanya mengandalkan Sungai Cisadane.

“Kalau sudah selesai nanti diserahkan dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemkot Bogor. Kemudian oleh pemkot diserahkan kepada PDAM Tirta Pakuan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Teknik PDAM Tirta Pakuan Ade Syaban Maulana menerangkan bahwa pasokan air dari Sungai Ciliwung ini memiliki debit air 300 liter per detik. Berdasarkan hitungannya, pasokan air baku baru ini bisa menambah pelayanan air kepada 21.000 pelanggan.

“Kalau kondisi sekarang ini dari Sungai Cisadane dengan debit air sekitar 2.000 liter per detik, bisa melayani 160.000 pelanggan di Kota Bogor dan 14.000 pelanggan di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Ade memaparkan bahwa secara keseluruhan proyek pembangunan SPAM Katulampa ini sudah menghabiskan anggaran Rp139 miliar.

Jika diperinci, pembiayaannya dimulai untuk pembangunan *intake* yang berlokasi di Cibanon, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada 2012 senilai Rp24 miliar. Kemudian, pada 2012 sampai 2014 pembebasan lahan SPAM senilai Rp10 miliar.

Selanjutnya, pada 2016 pembangunan WTP senilai Rp60 miliar,

juga pengadaan pipa distribusi utama senilai Rp35 miliar. Terakhir, pada 2017 pembangunan reservoir senilai Rp10 miliar. “Selanjutnya akan ada pengadaan pipa distribusi utama yang belum terpasang sepanjang 180 meter, biayanya sekitar Rp4 miliar, serta turap Rp2,60 miliar. Khusus yang sisa ini pakai anggaran dari kami.”

Sebelumnya, berkaitan dengan SPAM di daerah, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bakal mendampingi penyiapan 10 rencana kerja sama di sektor air minum pada tahun ini.

Anggota Unsur Profesi Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Poppy Indrawati Janto mengatakan bahwa rencana kerja sama dilakukan dalam dua skema.

Kedua skema itu yakni skema antarbadan usaha atau *business to business* dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Sampai Januari 2019, PDAM yang meminta pendampingan BPPSPAM untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta ada 10 PDAM,” ujarnya kepada *Bisnis*, belum lama ini. (*Antara*)

Judul	<b>LMAN Bayar Rp 218 Triliun</b>	Tanggal	Jumat, 12 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Sampai dengan minggu kedua April 2019, Lembaga Manajemen Aset Negara mengklaim telah membayar biaya pembebasan lahan proyek bendungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 senilai Rp 2,18 Triliun.		

# LMAN Bayar Rp2,18 Triliun

Bisnis, JAKARTA — Sampai dengan minggu kedua April 2019, Lembaga Manajemen Aset Negara mengklaim telah membayar biaya pembebasan lahan proyek bendungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 senilai Rp2,18 triliun.

Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan bahwa realisasi pembayaran terdiri atas pembayaran langsung dan dana talangan tanah yang ditanggung terlebih dahulu oleh kontraktor.

“LMAN sudah membayar Rp2,18 triliun dari yang ditagihkan saat ini mencapai Rp2,19 triliun,” kata Rahayu kepada *Bisnis*, Kamis (11/4).

Adapun, sisa yang ditagihkan dan tengah diproses oleh LMAN mencapai Rp13 triliun.

Sementara itu, bila diperinci, dana yang tertagih tercatat Rp2,13 triliun pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan realisasinya Rp2,12 triliun.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2018 tagihan sebesar

Rp0,06 triliun telah dibayarkan semua.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019, Kementerian PUPR akan menyelesaikan target pembangunan 65 bendungan yang terdiri atas 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan.

Jika diperinci, progres dari target 49 bendungan baru itu adalah 8 bendungan sudah selesai dibangun, 32 masih dalam proses pengerjaan, dan 9 baru direncanakan.

Sementara itu, progres dari 16 bendungan lanjutan yakni 9 proyek sudah selesai dibangun dan 7 masih dalam proses.

Bendungan yang telah rampung yakni Bendungan Rajui (Aceh), Jatigede (Jawa Barat), Bajulmati (Jawa Timur), Nipah (Jawa Timur), Titab (Bali), Paya Seunara (Aceh), dan Teritip (Kalimantan Timur). Selanjutnya, Bendungan Raknamo (NTT), Tanju (NTB), Mila (NTT), Rotiklod (NTT), Logung (Jateng), Sei

Gong (Kepri), dan Sindangheula (Banten).

Sementara itu, 15 bendungan baru yang akan selesai tahun ini adalah Bendungan Gongseng, Karalloe, Tapin, Passeloreng, Bintang Bano, Way Sekampung, dan Ladongi. Kemudian, Bendungan Napun Gete, Ciawi, Sukamahi, Karian, Keureuto, Gondang, Marangkayu, dan Kuningan.

Adapun, 10 bendungan yang akan dibangun tahun ini yakni Bendungan Jenelata, Pelosika, Jragung, Digoel, Tiro, Mbay, Budong-Budong, Ameroro, Tiu Suntut, dan Bulango Ulu.

Kebijakan dana talangan pengadaan lahan oleh kontraktor dan pemilik proyek bendungan, jalan tol, pelabuhan, dan perkeretaapin yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional berawal dari keterbatasan dana pemerintah.

Pada 16 Desember 2015, Kementerian Keuangan membentuk LMAN yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah Ditjen Kekayaan Negara. *(Krizia P. Kinanti)*

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Jumat, 12 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kendaraan bergantian melewati jembatan darurat Batang Kalu, di Jalur Padang – Bukittinggi, Kayutanam, Kab Padangpariaman, Sumatera Barat, Kamis (11/4).		

## ► JEMBATAN DARURAT



*Antara/Iggoy el Fitra*

**Kendaraan bergantian** melewati jembatan darurat Batang Kalu, di Jalur Padang–Bukittinggi, Kayutanam, Kab. Padangpariaman, Sumatera Barat, Kamis (11/4). Pembangunan kembali jembatan yang

ambruk oleh Kementerian PUPR dengan biaya Rp15 miliar tersebut dilanjutkan dengan pembuatan pondasi, dan untuk sementara kendaraan dapat bergantian melewati dua jembatan darurat yang sudah dibangun.

Judul	<b>Urban Farming Adaptasi Perubahan Iklim</b>	Tanggal	Jumat, 12 April 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 16)		
Resume	Kegiatan pertanian kota atau urban farming bisa menjadi salah satu solusi adaptasi perubahan iklim di wilayah perkotaan. Selain berfungsi sebagai peredam memanasnya temperatur akibat perubahan iklim, pertanian kota juga bisa berkontribusi mengurangi emisi dari transportasi perdagangan produk pertanian.		

# Urban Farming Adaptasi Perubahan Iklim

KEGIATAN pertanian kota atau *urban farming* bisa menjadi salah satu solusi adaptasi perubahan iklim di wilayah perkotaan. Selain berfungsi sebagai peredam memanasnya temperatur akibat perubahan iklim, pertanian kota juga bisa berkontribusi mengurangi emisi dari transportasi perdagangan produk pertanian.

Menurut Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Herizal, pertanian kota itu bisa menjadi strategi masyarakat perkotaan beradaptasi dengan temperatur bumi yang kian hari terus memanas.

Dalam diskusi Pojok Iklim yang digelar di Gedung Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, ia mengungkapkan hampir sebagian besar kota di Indonesia mengalami peningkatan suhu. Hal itu akibat masifnya urbanisasi atau perpindahan penduduk sejak periode 1980-an.

Aktivitas perkotaan, lanjutnya, menyebabkan tingginya polusi dan emisi sehingga memicu peningkatan suhu. Peningkatan temperatur di perkotaan bahkan bisa lebih cepat dari tren global karena masifnya aktivitas penduduk dan pembangunan.

Mengutip studi peneliti BMKG Siswanto (2015), Herizal menyebutkan peningkatan suhu di Jakarta bahkan mencapai lebih

dari 1 derajat Celsius dalam kurun waktu satu abad terakhir. Fenomena itu, imbuhnya, melebihi tren global pada periode yang sama.

"Pertanian kota bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi dampak pemanasan suhu, khususnya yang bersifat lokal atau *urban heat island*. Vegetasi hijau pada pertanian kota setidaknya bisa meredam temperatur panas, apalagi jika skalanya lebih besar. akan lebih berdampak," ujarnya.

Pertanian kota juga disebut sebagai salah satu strategi adaptasi untuk menghadapi dampak lain dari perubahan iklim, yakni terancamnya pertanian skala besar akibat perubahan pola

cuaca.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Sarwono Kusumaatmadja, kegiatan berkebun di perkotaan berpeluang menjadi pola pertanian hortikultura arus utama di masa depan pada skala komunitas dan rumah tangga. *Urban farming* bisa menyediakan suplai bahan pangan rendah emisi.

Ia menyebutkan Kota Surabaya sebagai salah satu contoh terbaik dengan *urban farming*. Belum lama ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diundang ke markas PBB di New York untuk berbagi pengalaman pertanian kota yang dilakukan. (Dhk/H-1)

Judul	<b>Normalisasi Sungai masih Terkendala Pembebasan Lahan</b>	Tanggal	Jumat, 12 April 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Upaya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung masih terkendala dengan belum diserahkannya lahan yang telah dibebaskan.		

# Normalisasi Sungai masih Terkendala Pembebasan Lahan

*Konsep pengendalian banjir yang digaungkan Pemprov DKI ialah naturalisasi. Sebaliknya, Kementerian PUPR selaku pelaksana memiliki konsep normalisasi.*

**FERDIAN ANANDA MAJNI**  
ferdian@mediaindonesia.com

**U**PAYA Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung masih terkendala dengan belum diserahkannya lahan yang telah dibebaskan. Selain itu, hingga saat ini juga belum ada kesepakatan soal konsep naturalisasi dan normalisasi.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan pihaknya belum menerima penyerahan 13 hektare (ha) tanah yang telah dibebaskan Pemerintah DKI Jakarta untuk untuk normalisasi Sungai Ciliwung. "Kalau penyerahan lahan belum dilakukan," kata Bambang, di Kantor Dinas Sumber Daya Air DKI, Jakarta

Pusat, kemarin.

Bambang menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan Dinas SDA DKI untuk membahas program strategis daerah penataan Sungai Ciliwung Lama, Kanal Banjir Barat, Waduk Cimanggis, dan Kali Sunter secara naturalisasi.

"Ini sudah ada lahan-lahan yang sudah dibebaskan. Kami koordinasikan desainnya. Ada yang sudah dibebaskan ini Selasa (9/4) kemarin. Ini yang Ciliwung, pengadaan tanah normalisasi. Tapi hanya suratnya belum," sebutnya.

Sehubungan dengan pembebasan tanah untuk normalisasi Ciliwung, Bambang belum mengetahui kelanjutan realisasinya. Apalagi, pihaknya belum menerima laporan secara resmi.

Bambang mengatakan rencana naturalisasi ini pun belum final. Sebagai

contoh, ia menunjuk Sungai Ciliwung. Menurut Bambang, secara lanskap, Sungai Ciliwung cenderung ke arah restorasi ekosistemnya seperti proses airnya dan kondisi penampungan.

"Artinya debit air harus memenuhi yang direncanakan. Jadi dalam arti jangan sampai air yang melewati sungai atau air yang ada di danau itu kosong," paparnya.

Meskipun demikian, nantinya setelah menerima penjelasan secara resmi, pihaknya akan mengecek ke lapangan supaya bisa menentukan titik-titik yang akan terdampak normalisasi.

"Makanya saya belum dapat penjelasan dari beliau (Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan)," lanjutnya.

## Pembebasan lahan

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengatakan telah menyiapkan 13 ha lahan untuk mendukung proyek pengendalian banjir. Lahan tersebut terdiri dari 200 bidang tanah yang berada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.

"Kami siapkan pelebaran yang men-

dukung. Ini sudah saya laporkan ke BBWSCC sehubungan dengan pengadaan tanah normalisasi Ciliwung," kata Asisten Pembangunan DKI Jakarta, Yusmada Faizal.

Rinciannya 200 bidang tanah itu tersebar di Balekambang, Cililitan, Cawang, Kampung Melayu, Tanjung Barat, Pejaten Timur, dan Bukit Duri. Pengadaan lahan itu menandakan bahwa Pemprov DKI mendukung program pemerintah pusat.

"Itu poinnya saya mendukung program Kementerian PU-Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Catat itu. Nah, bentuknya nanti setelah pelebaran itu kami diskusikan," terangnya.

Kementerian PU-Pera merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan naturalisasi dan normalisasi sungai Jakarta.

Namun, Yusmada mengatakan pihaknya belum bisa memastikan lahan itu akan digunakan untuk proyek normalisasi atau naturalisasi. Pasalnya, konsep pengendalian banjir milik Pemprov DKI Jakarta berbeda dengan konsep yang dimiliki Kementerian PU-Pera. Konsep pengendalian banjir yang digaungkan Pemprov DKI ialah naturalisasi. Sebaliknya, Kementerian PU-Pera memiliki konsep normalisasi.

Yusmada mengakui bahwa konsep naturalisasi dan normalisasi pada dasarnya sama. Bedanya, naturalisasi menggunakan bahan-bahan alami seperti beronjong.

"Iya makanya saya enggak mau langsung ini (pernyataan). Kami analisis bersama, bentuknya nanti setelah pelebaran itu kami diskusikan. Kami minggu depan ada pertemuan dengan BBWSCC," tegasnya. (J-2)

Judul	<b>BBWSCC Cek Lahan yang sudah bebas</b>	Tanggal	Jumat, 12 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 20)		
Resume	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane segera memeriksa bidang lahan yang sudah dibebaskan untuk penataan kali. Ada 13 hektar lahan yang dilaporkan sudah dibebaskan di sepanjang Kali Ciliwung untuk keperluan penataan kali.		

## BBWSCC Cek Lahan yang Sudah Bebas

**JAKARTA, KOMPAS** — Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane segera memeriksa bidang lahan yang sudah dibebaskan untuk penataan kali. Ada 13 hektar lahan yang dilaporkan sudah dibebaskan di sepanjang Kali Ciliwung untuk keperluan penataan kali.

Bambang Hidayah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), se usai rapat koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta di gedung dinas teknis Jatibaru, Kamis (11/4/2019), mengatakan, dari komunikasi yang dilakukan Selasa, Pemprov DKI menyebutkan ada 13 hektar lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung yang sudah dibebaskan.

"Namun, ini juga baru pemberitahuan via pesan Whatsapp. Suratnya belum," ujarnya.

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal, Selasa lalu, juga menjelaskan perihal 13 hektar lahan yang sudah dibebaskan tersebut. Lahan yang dibebaskan itu berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, yaitu di Gedong, Bolekambang, Cililitan, Cawang,

Kampung Melayu, Tanjung Barat, Pejaten Timur, dan Bukit Duri.

Namun, BBWSCC belum mengetahui persis status dan kejelasan lahan tersebut. "Saya belum tahu apakah ini sudah akumulatif atau tambahan terakhir, maksudnya pengukuran lahan pada tahun-tahun terakhir yang dibebaskan 2017 atau 2018. Makanya, saya belum mendapat penjelasan dari beliau (Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup)," kata Bambang.

Jika jelas ada lahan yang sudah dibebaskan, BBWSCC bisa mengusulkan dalam APBN 2020 untuk penataan kawasan sungai. "Masih ada waktu kalau untuk 2020. Jadi mungkin sampai Juni ini masih ada kesempatan apakah ada penambahan (lahan yang sudah dibebaskan) lagi. Makanya, saya ingin tahu dasarnya seperti apa. Apakah masih berjalan di lapangan, apakah masih didapatkan lahannya," jelas Bambang.

BBWSCC menyatakan, tambahan pembebasan lahan ditunggu karena untuk penataan sungai, mau tidak mau harus melakukan pembebasan lahan. Sebab, hampir seluruh sungai

**Jika jelas ada lahan yang sudah dibebaskan, BBWSCC bisa mengusulkan dalam APBN 2020 untuk penataan kawasan sungai.**

menyempit sehingga tidak berfungsi optimal.

Untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, idealnya sungai berbentuk trapesium. Dasar sungai selebar 30-35 meter, dengan permukaan atas selebar 50 meter, serta di kanan dan kiri kali ada lahan kosong selebar 7,5 meter untuk jalur inspeksi. Jika di lapangan sulit mendapatkan pembebasan lahan. Saat ini, sebagian besar lebar kali di Jakarta sekitar 15 meter saja.

Terkait Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi, Bambang berpendapat, program normalisasi kali yang sudah dikerjakan pun

sudah memenuhi aspek naturalisasi yang disebut dalam pergub.

Konsep dari pergub itu adalah mengelola sarana-prasarana sumber daya air dengan memperhatikan kapasitas tampungan. Mengacu pada konsep itu, normalisasi yang sudah dilakukan adalah untuk bisa kembali menampung dan mengalirkan debit banjir. Lalu adanya jalan inspeksi di kanan dan kiri adalah sebagai bagian dari ruang terbuka hijau. Dalam beberapa tahun terakhir, normalisasi di Ciliwung untuk pengendalian debit banjir sudah berfungsi saat musim hujan.

Jika normalisasi sudah berjalan, tahapan berikutnya adalah menjaga agar sampah apa pun tidak masuk kali untuk menjaga kualitas air. Dari tahapan tersebut, naturalisasi bisa berjalan. "Normalisasi kali itu ya bagian dari naturalisasi," jelasnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Dinas Sumber Daya Air DKI memaparkan rencana program naturalisasi 2019 di tiga waduk dan dua sungai, yaitu Waduk Cimanggis, Kampung Rambut-an, dan Sunter Selatan, serta Kali Ciliwung segmen lama dan Kanal Barat. (HLN)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Jumat, 12 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Rusun Khusus Santri Ponpes Al Islam Babussalam, Kalibening, Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur.		

► **RUSUN KHUSUS SANTRI**



*Antara/Syaiful Arif*

**Santri berada** di depan rumah susun khusus santri Ponpes Al Islam Babussalam, Kalibening, Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, belum lama ini. Pembangunan rusun dari Kementerian

Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat tersebut untuk membantu para siswa yang sebagian berasal dari luar daerah agar bisa memiliki tempat tinggal yang layak.

